



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memudahkan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pihak lain yang ditugaskan membantu kegiatan Pemerintah Kota di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 1, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. biaya Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Khusus biaya transportasi udara dibayar berdasarkan klasifikasi:
  - a. Kelas bisnis diperuntukan bagi Walikota/Wakil Walikota dan Ketua DPRD;
  - b. Kelas ekonomi diperuntukan bagi Sekretaris Daerah, Para Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS Eselon II b, Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan PNS Non Eselon serta Pihak Lain.

- (3) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan:
  - a. Untuk Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD, Para Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dibayarkan secara riil;
  - b. Untuk Anggota DPRD, PNS Eselon II b, Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan PNS Non Eselon serta Pihak Lain dibayarkan secara riil dan tidak melampaui batas tertinggi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Perubahan/kenaikan harga tiket pesawat/kapal laut akibat *reschedule* yang disebabkan alasan/kepentingan pribadi, bukan karena alasan kedinasan, ditanggung oleh masing-masing pelaksana Perjalanan Dinas.
- (5) Biaya transportasi darat/angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan klasifikasi tingkatan:
  - a. tingkat khusus diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota;
  - b. tingkat A diberikan kepada Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Para Wakil Ketua dan anggota DPRD;
  - c. tingkat B diberikan kepada PNS Eselon II b, Eselon III, Eselon IV dan PNS Non Eselon serta Pihak Lain.
- (6) Biaya transportasi darat/angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat menggunakan kendaraan sewa apabila:
  - a. Perjalanan Dinas dilaksanakan secara rombongan atau paling sedikit 3 (tiga) orang;
  - b. Dari bandara menuju kota tujuan tidak tersedia moda transportasi umum dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan di luar Wilayah Kalimantan Timur.
- (7) Biaya transportasi darat luar wilayah Kalimantan Timur dibayarkan sesuai bukti riil berdasarkan klasifikasi tingkatan/standar transportasi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Sewa kendaraan angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu:
  - a. dari atau ke bandara menuju kota/tempat tujuan Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur; atau
  - b. dari atau ke Balikpapan menuju kota/tempat tujuan Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

- (9) Sewa kendaraan angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak untuk sewa kendaraan harian.
  - (10) Biaya sewa kendaraan angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar.
  - (11) Batas tertinggi biaya sewa kendaraan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III.1.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (12) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam wilayah Kalimantan Timur yang menggunakan kendaraan dinas diberikan penggantian biaya Bahan Bakar Kendaraan setelah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara riil dengan batas tertinggi biaya Bahan Bakar Kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (13) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam wilayah Kalimantan Timur yang menggunakan kendaraan pribadi dapat diberikan penggantian biaya Bahan Bakar Kendaraan disetarakan dengan kendaraan dinas 1000 CC sampai dengan 1500 CC.
  - (14) Batas tertinggi transportasi darat/angkutan antar kota dalam wilayah Kalimantan Timur dibayarkan sesuai bukti riil berdasarkan klasifikasi/biaya transportasi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat 3 dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melampaui batas tertinggi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang digunakan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.

- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menginap di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
  - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tertinggi biaya hotel di kota tujuan;
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Perjalanan Dinas untuk Ajudan Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD yang bertugas mendampingi pimpinan, dibayarkan biaya penginapan standar harga kamar terendah pada hotel tempat pimpinan menginap.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 11 April 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 21 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

NIP.19610806 199003 1 004

LAMPIRAN III.I  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS

**A. BATAS TERTINGGI TIKET TRANSPORTASI UDARA PULANG PERGI UNTUK  
 PERJALANAN DINAS KELAS EKONOMI**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI	
1	Balikpapan	Jakarta	Rp	3,415,600
2	Balikpapan	Bandung	Rp	3,300,000
3	Balikpapan	Banda Aceh	Rp	6,765,200
4	Balikpapan	Batam	Rp	5,337,400
5	Balikpapan	Denpasar	Rp	3,954,000
6	Balikpapan	Jayapura	Rp	9,583,400
7	Balikpapan	Yogyakarta	Rp	2,819,400
8	Balikpapan	Makassar	Rp	1,723,800
9	Balikpapan	Manado	Rp	2,750,800
10	Balikpapan	Medan	Rp	6,316,400
11	Balikpapan	Padang	Rp	5,275,800
12	Balikpapan	Palembang	Rp	4,864,400
13	Balikpapan	Pekanbaru	Rp	5,502,400
14	Balikpapan	Semarang	Rp	4,756,600
15	Balikpapan	Solo	Rp	4,844,600
16	Balikpapan	Surabaya	Rp	2,386,000
17	Balikpapan	Timika	Rp	9,130,200
18	Balikpapan	Bandar Lampung	Rp	4,164,800
19	Balikpapan	Biak	Rp	8,831,000
20	Balikpapan	Jambi	Rp	5,128,400
21	Balikpapan	Malang	Rp	5,117,400
22	Balikpapan	Mataram	Rp	5,775,200
23	Balikpapan	Pangkal Pinang	Rp	4,591,600
24	Balikpapan	Banjarmasin	Rp	1,420,000
25	Balikpapan	Pontianak	Rp	5,366,000
26	Balikpapan	Palangkaraya	Rp	4,635,600
27	Balikpapan	Palu	Rp	1,480,000
28	Balikpapan	Kupang	Rp	5,621,200
29	Balikpapan	Ambon	Rp	7,911,400
30	Balikpapan	Kendari	Rp	6,490,200
31	Balikpapan	Ternate	Rp	7,489,000
32	Balikpapan	Bengkulu	Rp	5,489,200
33	Balikpapan	Gorontalo	Rp	4,008,600
34	Balikpapan	Mamuju	Rp	3,441,000
35	Balikpapan	Manokwari	Rp	7,892,800
36	Balikpapan	Tarakan	Rp	1,980,000
37	Balikpapan	Berau	Rp	1,620,000
38	Balikpapan	Sendawar	Rp	1,900,000
39	Balikpapan	Nunukan	Rp	2,942,000

**B. STANDAR TRANSPORTASI DARAT/ANGKUTAN ANTAR KOTA  
DI LUAR WILAYAH PROVINSI KALTIM**

TINGKAT	
KHUSUS	SEWA KENDARAAN
A	SEWA KENDARAAN
B	EKSEKUTIF
B ROMBONGAN / WILAYAH YANG TIDAK TERSEDIA TRANSPORTASI UMUM	SEWA KENDARAAN

**C. BATAS TERTINGGI SEWA KENDARAAN ANTAR KOTA**

TINGKAT			
KHUSUS	A	B	
		INOVA ( SEJENISNYA )	MINIBUS
Rp 2,800,000	Rp 2,500,000	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000

CATATAN : - UNTUK BIAYA TRANSPORTASI TINGKAT B SEWA KENDARAAN DIBAYARKAN JIKA PERJALANAN DILAKUKAN SECARA ROMBONGAN  
 - APABILA PERJALANAN DINAS DILAKUKAN PERSEORANGAN MAKA DIBAYARKAN SESUAI BUKTI RILL NOTA TRANSPORTASI UMUM ( BUKAN SEWA ) KELAS EKSEKUTIF

**D. BATAS TERTINGGI PEMBERIAN TAMBAHAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

No.	TUJUAN (PP) DARI BALIKPAPAN	KLASIFIKASI BESARAN KAPASITAS MESIN ( CC )	
		1000 CC - 1500CC	1600 CC - 2500 CC
1	SAMARINDA	15 LITER	25 LITER
2	BONTANG/ KUTAI TIMUR	20 LITER	30 LITER
3	PENAJAM PASER UTARA	7 LITER	17 LITER
4	TENGGARONG	15 LITER	25 LITER
5	PASIR	20 LITER	30 LITER
6	MELAK/KUTAI BARAT	50 LITER	60 LITER
7	MAHAKAM ULU	60 LITER	70 LITER

**E. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR ( AT COST )**

NO	TUJUAN	TINGKAT KHUSUS	TINGKAT A	ESELON II/b	ESELON III	ESELON IV	ESELON V/ GOL. IV	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS/ Non PNS
1	SAMARINDA	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 350,000
2	BONTANG	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000
3	KUTAI TIMUR	Rp 1,100,000	Rp 1,050,000	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000
4	KUTAI KERTANEGARA	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000
5	KUTAI BARAT	Rp 1,500,000	Rp 1,450,000	Rp 1,400,000	Rp 1,350,000	Rp 1,300,000	Rp 1,250,000	Rp 1,200,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000
6	PENAJAM PASER UTARA	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000
7	PASER	Rp 1,250,000	Rp 1,200,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000	Rp 1,050,000	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000

WALIKOTA BALIKPAPAN,

**tttd.**

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD HILDE  
NIP.19610806199003 1 004



LAMPIRAN IV.1  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS

I. BATAS TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN/HOTEL LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( AT COST )

No	Provinsi	Walikota/Wawali	Eselon IIA/PIM.DPRD	Eselon IIB/Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV	Eselon V, Gol IV, GOL III II,I,Non PNS /Pihak Lain
1	Nangroe Aceh Darussalam	Rp 3,750,500	Rp 2,943,000	Rp 1,635,000	Rp 1,355,294	Rp 515,493	Rp 472,535
2	Bali	Rp 4,566,250	Rp 4,072,500	Rp 2,262,500	Rp 1,503,529	Rp 932,958	Rp 855,211
3	Bangka Belitung	Rp 3,298,750	Rp 2,317,500	Rp 1,287,500	Rp 847,059	Rp 550,141	Rp 504,296
4	Banten	Rp 3,948,750	Rp 3,217,500	Rp 1,787,500	Rp 1,185,882	Rp 549,296	Rp 503,521
5	Bengkulu	Rp 2,908,750	Rp 1,777,500	Rp 987,500	Rp 825,882	Rp 566,197	Rp 519,014
6	DI. Yogyakarta	Rp 3,653,000	Rp 2,808,000	Rp 1,560,000	Rp 921,176	Rp 530,704	Rp 486,479
7	DKI. Jakarta	Rp 3,250,000	Rp 2,250,000	Rp 1,250,000	Rp 900,000	Rp 600,000	Rp 550,000
8	Gorontalo	Rp 3,266,250	Rp 2,272,500	Rp 1,262,500	Rp 963,529	Rp 515,493	Rp 472,535
9	Papua Barat	Rp 3,672,500	Rp 2,835,000	Rp 1,575,000	Rp 1,164,706	Rp 507,042	Rp 464,789
10	Jambi	Rp 3,298,750	Rp 2,317,500	Rp 1,287,500	Rp 835,412	Rp 481,690	Rp 441,549
11	Jawa Barat	Rp 4,013,750	Rp 3,307,500	Rp 1,837,500	Rp 1,080,588	Rp 557,746	Rp 511,268
12	Jawa Tengah	Rp 3,940,625	Rp 3,206,250	Rp 1,781,250	Rp 1,005,882	Rp 549,296	Rp 503,521
13	Jawa Timur	Rp 3,497,000	Rp 2,592,000	Rp 1,440,000	Rp 1,024,941	Rp 583,099	Rp 534,507
14	Kalimantan Barat	Rp 3,461,250	Rp 2,542,500	Rp 1,412,500	Rp 995,294	Rp 532,394	Rp 488,028
15	Kalimantan Selatan	Rp 3,932,500	Rp 3,195,000	Rp 1,775,000	Rp 1,027,059	Rp 591,549	Rp 542,254
16	Kalimantan Tengah	Rp 3,818,750	Rp 3,037,500	Rp 1,687,500	Rp 1,005,882	Rp 540,845	Rp 495,775
17	Kalimantan Utara	Rp 4,156,750	Rp 2,542,500	Rp 1,412,500	Rp 1,005,882	Rp 650,704	Rp 596,479
18	Kepulauan Riau	Rp 3,136,250	Rp 2,092,500	Rp 1,162,500	Rp 900,000	Rp 490,141	Rp 449,296
19	Lampung	Rp 3,497,000	Rp 2,592,000	Rp 1,440,000	Rp 1,027,059	Rp 485,070	Rp 444,648
20	Maluku	Rp 3,298,750	Rp 2,317,500	Rp 1,287,500	Rp 931,765	Rp 517,183	Rp 474,085
21	Maluku Utara	Rp 4,082,000	Rp 3,402,000	Rp 1,890,000	Rp 847,059	Rp 523,944	Rp 480,282
22	Nusa Tenggara Barat	Rp 3,383,250	Rp 2,434,500	Rp 1,352,500	Rp 794,118	Rp 540,845	Rp 495,775
23	Nusa Tenggara Timur	Rp 3,250,000	Rp 2,250,000	Rp 1,250,000	Rp 911,647	Rp 566,197	Rp 519,014
24	Papua	Rp 3,672,500	Rp 2,835,000	Rp 1,575,000	Rp 974,118	Rp 557,746	Rp 511,268
25	Riau	Rp 3,371,875	Rp 2,418,750	Rp 1,343,750	Rp 974,118	Rp 549,296	Rp 503,521
26	Sulawesi Barat	Rp 3,298,750	Rp 2,317,500	Rp 1,287,500	Rp 1,175,294	Rp 507,042	Rp 464,789
27	Sulawesi Selatan	Rp 3,250,000	Rp 2,250,000	Rp 1,250,000	Rp 1,114,941	Rp 587,324	Rp 538,380
28	Sulawesi Tengah	Rp 3,315,000	Rp 2,340,000	Rp 1,300,000	Rp 766,588	Rp 507,042	Rp 464,789
29	Sulawesi Tenggara	Rp 3,363,750	Rp 2,407,500	Rp 1,337,500	Rp 969,882	Rp 549,296	Rp 503,521
30	Sulawesi Utara	Rp 3,924,375	Rp 3,183,750	Rp 1,768,750	Rp 889,412	Rp 549,296	Rp 503,521
31	Sumatera Barat	Rp 3,298,750	Rp 2,317,500	Rp 1,287,500	Rp 1,058,824	Rp 557,746	Rp 511,268
32	Sumatera Selatan	Rp 3,250,000	Rp 2,250,000	Rp 1,250,000	Rp 837,529	Rp 531,549	Rp 487,254
33	Sumatera Utara	Rp 3,298,750	Rp 2,317,500	Rp 1,287,500	Rp 900,000	Rp 566,197	Rp 519,014

II. BATAS TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN/HOTEL DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (AT COST)

NO	PROVINSI	Walikota/Wawali	Eselon IIA/PIM.DPRD	Eselon IIB/Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV	Eselon V, Gol IV, Gol III II,I,Non PNS /Pihak Lain	
1	Paser	Rp 1,400,000	Rp 900,000	Rp 900,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 500,000	
2	Penajam Paser Utara	Rp 1,350,000	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 500,000	
3	Tenggarong	Rp 1,800,000	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 800,000	
4	Kutai Barat	Rp 1,400,000	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 500,000	
5	Bontang	Rp 1,800,000	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 800,000	
6	Sangata	Rp 1,800,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 600,000	
7	Berau	Rp 1,800,000	Rp 900,000	Rp 900,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 500,000	
8	Mahulu	Tidak ada Hotel						
9	Samarinda	Rp 2,500,000	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 600,000	
10	Tarakan	Rp 1,800,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 600,000	
11	Bulungan	Rp 1,800,000	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 500,000	
12	Nunukan	Rp 1,800,000	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 500,000	
13	Malinau	Rp 1,700,000	Rp 700,000	Rp 700,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 500,000	
14	Tana Tidung	Rp 1,300,000	Rp 700,000	Rp 700,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 500,000	

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PARADE